

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh dari evaluasi tarif angkutan kota di Kota Bandung:

1. Berdasarkan analisis diatas terdapat perbedaan antara tarif eksisting dengan tarif yang sudah dihitung dengan ketentuan BOK. Pada tarif eksisting operator mematok tarif sebesar Rp 10,000 sementara besaran tarif berdasarkan BOK pada trayek 13 diperoleh sebesar Rp 6,370 sedangkan untuk trayek 14 sebesar 8,000. Hal ini menyatakan bahwa tarif saat ini pada trayek 13 dan 14 tidak sesuai untuk diterapkan karena sudah melebihi Biaya Operasional Kendaraan
2. Besaran tarif yang sesuai dari sisi pengguna jasa dapat dilihat berdasarkan analisis ATP dan WTP. Dari analisis ATP & WTP didapatkan pada trayek 13 sebesar Rp 5,000 sementara untuk trayek 14 sebesar Rp 6,000.
3. Dari analisis tarif berdasarkan BOK, ATP dan WTP tarif yang paling rendah merupakan tarif berdasarkan ATP & WTP atau kemampuan dan kemauan penumpang dalam membayar, namun tarif ini tidak dapat digunakan karena masih kurang dari Biaya Operasional Kendaraan, sehingga dari ketiga segi tarif yang dapat digunakan merupakan tarif berdasarkan BOK. Namun untuk tetap memenuhi kemauan penumpang dalam membayar, pemerintah dapat menerapkan sistem angkutan subsidi pada trayek tersebut.
4. Hasil analisis kelayakan finansial berdasarkan metode NPV, BCR dan IRR menyatakan bahwa investasi pada trayek 13 dan 14 dapat dilaksanakan (layak) dengan perolehan NPV pada trayek 13 sebesar Rp 150,098,815 sedangkan pada trayek 14 sebesar Rp 86,403,287. Sementara untuk BCR pada trayek 13 didapat sebesar 1.14 sedangkan untuk trayek 14

sebesar 1.09 dan perolehan IRR pada trayek 13 yakni 47.49% sedangkan pada trayek 14 yakni 30.02%.

5. Dari tiga skema analisis subsidi, biaya yang paling ekonomis untuk dikeluarkan oleh pemerintah daerah yakni biaya dengan skema subsidi Selisih Biaya Operasional masing-masing sebesar Rp 82,553,097 untuk trayek 13 dan Rp 69,123,001 untuk trayek 14.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari perhitungan tarif, maka disarankan beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pentarifan angkutan kota di Kota Bandung khususnya pada trayek 13 dan trayek 14 agar operator menetapkan tarif yang sesuai dengan SK tarif yang sudah ditetapkan.
2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya mengadakan pengadaan terkait tarif angkutan kota dan mengontrol pelayanan angkutan kota secara berkala sehingga dapat mengetahui apabila terjadi perbedaan terhadap tarif yang diberlakukan oleh operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah nantinya. Jika masih terjadi adanya penyimpangan tarif, pemerintah dapat mengambil kebijakan lebih lanjut salah satunya dengan cara pembekuan izin trayek sampai dengan pencabutan izin trayek.
3. Untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam menggunakan angkutan kota, khususnya pada trayek 13 dan 14 dapat dioptimalkan dengan menerapkan mekanisme pemberian subsidi angkutan kota sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Mekanisme pemberian subsidi dapat mengikuti mekanisme pemberian subsidi pada daerah lain contohnya pada Kabupaten Tabanan dan Kota Kediri. Pemberian subsidi dapat berupa dana yang diberikan kepada operator dapat berupa voucher pembelian BBM yang jumlahnya disesuaikan dengan trayek yang dilayani (km tempuh).